

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang sering terjadi di berbagai negara, terutama negara yang sedang berkembang. Memecahkan masalah kemiskinan bukanlah hal yang mudah, terbukti hingga kini masalah kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai negara. Kemiskinan adalah sebuah masalah sosial yang perlu diatasi. Masalah sosial ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, perusahaan, dan kelompok masyarakat.

Menurut Mulyono, kemiskinan adalah permasalahan yang sulit diatasi oleh masyarakat Indonesia. Beban kemiskinan terasa lebih berat pada kelompok tertentu, dan biasanya perempuan adalah yang paling terkena dampaknya. Kemiskinan terlihat dari masyarakat yang hidup dengan kondisi yang sangat terbatas, baik dalam produksi, peluang berwirausaha, pendidikan, maupun fasilitas hidup yang membuat mereka kesulitan untuk menjalankan kegiatan atau usaha mereka. Dari segi ekonomi, kemiskinan bisa dilihat dari tingkat kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan bagi sekelompok orang.¹

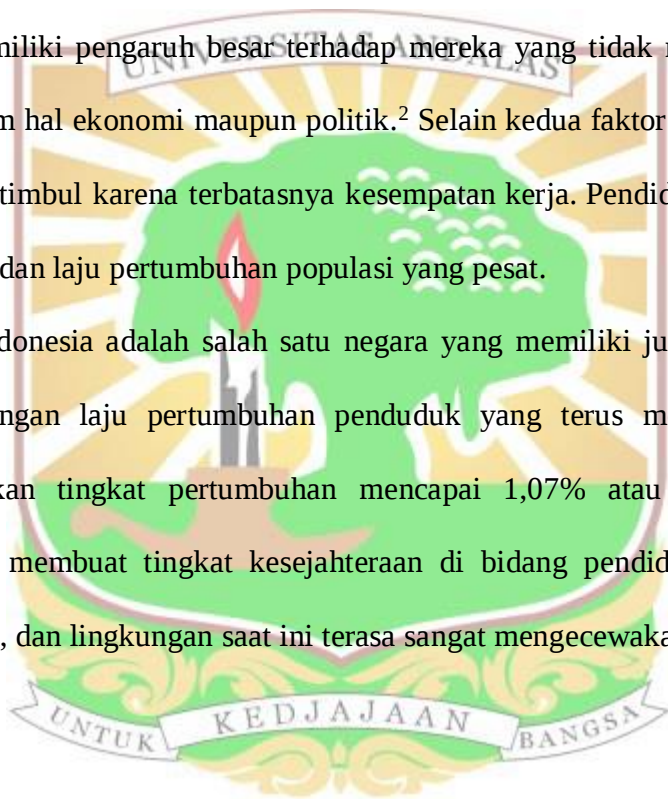
Kemiskinan muncul akibat sejumlah faktor. Yang pertama adalah kemiskinan dalam masyarakat yang terkait dengan budaya yang ada di dalamnya. Dari sudut pandang ini, kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya semangat kerja seseorang di dalam komunitas, atau dengan kata

¹ Mulyono, S. E., *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Ombak, 2017), hal.5.

lain, kemiskinan tergantung pada seberapa keras seseorang bekerja atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Faktor kedua adalah kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan dalam memiliki sumber daya ekonomi di tengah masyarakat. Ketidakseimbangan dalam memiliki tanah di kalangan masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, bisa berdampak pada terbentuknya kemiskinan. Kondisi ini memisahkan dua kelompok, yaitu pemilik tanah yang memiliki pengaruh besar terhadap mereka yang tidak memiliki tanah, baik dalam hal ekonomi maupun politik.² Selain kedua faktor itu, kemiskinan juga bisa timbul karena terbatasnya kesempatan kerja. Pendidikan yang tidak memadai dan laju pertumbuhan populasi yang pesat.

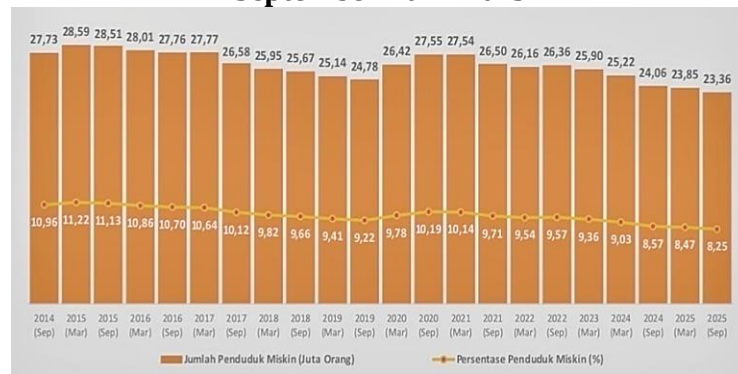
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk besar, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat pesat, diperkirakan tingkat pertumbuhan mencapai 1,07% atau bahkan lebih. Sehingga membuat tingkat kesejahteraan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan saat ini terasa sangat mengecewakan.³



² Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Pemberdayaan dan Perempuan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997), hal. 16.

³ Badan Pusat Statistik (BPS), 2025.

Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, September 2014-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025.

Secara umum, dari gambar tersebut, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dalam jumlah maupun persentase sejak September 2014 hingga September 2025, kecuali pada bulan Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Tingkat kemiskinan tertinggi dalam periode tersebut terjadi pada bulan Maret 2015, dengan jumlah orang miskin mencapai 28,59 juta orang atau setara dengan 11,22 persen dari total penduduk. Peningkatan jumlah dan persentase orang miskin pada bulan Maret 2015 dan September 2022 terjadi karena harga bahan bakar minyak naik. Sementara itu, kenaikan pada bulan Maret dan September 2020 terjadi karena wabah virus Corona yang menyerang Indonesia. Ekonomi Indonesia yang mulai membaik setelah pandemi seiring dengan penurunan perlahan tingkat kemiskinan dari Maret 2021 hingga September 2025. Pada bulan September tahun 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,25%. Oleh karena itu pemerintah membuat program agar keluarga lebih sejahtera, yang didasari oleh masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat sendiri, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya dalam bidang perekonomian di dalam setiap keluarga.

**Tabel 1. 1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau,
September 2025**

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Sumatera	6,79	9,18	8,07	1,98	3,10	5,08
Jawa	6,83	10,14	7,81	7,58	4,74	12,32
Bali dan Nusa Tenggara	7,04	15,56	11,30	0,57	1,26	1,83
Kalimantan	4,11	5,99	5,02	0,37	0,51	0,88
Sulawesi	5,36	11,36	8,70	0,49	1,31	1,80
Maluku dan Papua	6,38	25,53	18,22	0,19	1,26	1,45
Indonesia	6,60	10,72	8,25	11,18	12,18	22,36

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025.

Di antara pulau-pulau di Indonesia, Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu 12,32 juta orang atau sekitar 7,81%, kemudian diikuti oleh Sumatra dengan 5,08 juta orang atau 8.07%.

**Tabel 1. 2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2025**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
Kab. Kep. Mentawai	13.22	13.74
Kab. Pesisir Selatan	6.52	31.53
Kab. Solok	6.52	25.23
Kab. Sijunjung	5.15	13.55
Kab. Tanah Datar	3.59	12.57
Kab. Padang Pariaman	5.86	25.08
Kab. Agam	5.97	30.57
Kab. Lima Puluh Kota	6.1	24.61
Kab. Pasaman	6.02	18
Kab. Solok Selatan	6	11.44
Kab. Dharmasraya	4.61	13.52
Kab. Pasaman Barat	6.3	31.68
Kota Padang	3.63	37.38
Kota Solok	2.91	2.31
Kota Sawahlunto	2.72	1.79
Kota Padang Panjang	4.97	2.9

Kota Bukittinggi	3.78	5.46
Kota Payakumbuh	4.95	7.37
Kota Pariaman	3.83	3.63
Sumatera Barat	5.35	312.35

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2025.

Sementara itu, di provinsi Sumatra Barat, jumlah warga yang berpenghasilan rendah mencapai 312.350 orang. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatra Barat dan kabupaten serta kota sekitarnya merupakan bagian dari wilayah tingkat II yang memiliki kegiatan pembangunan ekonomi yang cukup dinamis. Kemiskinan di Kota Padang selama periode 2015 hingga 2025 menunjukkan tren yang positif baik dalam jumlah maupun persentasenya.

Jumlah orang miskin di Kota Padang per Maret 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan kota lain, mencapai 37.380 orang atau 3,63%. Namun, angka ini masih menunjukkan adanya penurunan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun jumlah orang miskin di Kota Padang berkurang, kenyataannya tingkat kemiskinan di sana masih tergolong tinggi.

Masalah ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan negara secara umum, karena sektor ekonomi bisa membawa masyarakat keluar dari keadaan miskin, diperlakukan tidak adil, serta tidak berpendidikan. Peran ekonomi dalam keluarga sangat penting, karena ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan memberi keterampilan untuk kehidupan anggota keluarga dan membantu mereka menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Oleh karena itu, melakukan usaha kecil skala di dalam komunitas sangat penting. Ekonomi rumah tangga adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di tingkat keluarga, dengan memperhatikan kondisi

keuangan keluarga dan tempat usaha. Aspek ekonomi di rumah tangga muncul karena para anggota keluarga berpikir secara kreatif agar bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

Kemiskinan dan kemampuan keluarga untuk tetap stabil secara ekonomi adalah tantangan utama dalam mengembangkan bangsa. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang dimulai dari tingkat masyarakat, dengan peran utama wanita sebagai penggerakannya, demi mewujudkan keluarga yang hidupnya makmur dan berkeadilan. Meskipun biasanya identik dengan peran wanita, secara hukum PKK adalah mitra kerja pemerintah yang inklusif yang bertujuan mempercepat proses pembangunan. PKK mengambil langkah dengan meluncurkan program UP2K untuk meningkatkan penghasilan keluarga. UP2K bertujuan untuk membantu keluarga meningkatkan kondisi ekonomi mereka dengan cara melakukan usaha yang menghasilkan keuntungan, baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam kelompok. Program ini berjalan terus-menerus karena ada aturan hukum yang kuat mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke tingkat kelurahan.

Secara nasional, UP2K merupakan bagian integral dari pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Perpres ini menjadi payung hukum utama yang menegaskan bahwa menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional. Penjabaran operasionalnya diatur dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 yang memberikan mandat bagi PKK untuk melakukan

penguatan ekonomi keluarga melalui peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Regulasi ini memastikan bahwa PKK memiliki struktur yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam struktur organisasi PKK terdapat empat kelompok kerja yang diberi nama Pokja. Pokja I berfokus pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta kerja sama yang baik. Pokja II bertanggung jawab atas bidang pendidikan, keterampilan, dan pengembangan koperasi. Pokja III bertanggung jawab mengurus persoalan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta manajemen rumah tangga. Sementara itu, Pokja IV mengurus masalah kesehatan, kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang sehat. Pokja II adalah kelompok kerja yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui program-program pendidikan, keterampilan, dan perkembangan kehidupan berkoperasi. Salah satu cara untuk mewujudkan program kerja dari Pokja II PKK adalah melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK). Program UP2K-PKK ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 B Tahun 1993 yang menjelaskan panduan mengenai program usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga PKK.⁴

Gerakan PKK tidak hanya dijalankan oleh kaum perempuan saja, meskipun secara historis dan stigma masyarakat PKK sering diasosiasikan dengan ibu-ibu, secara aturan resmi laki-laki juga dapat menjadi anggota dan pengurus. Keanggotaan TP-PKK bersifat terbuka baik laki-laki maupun

⁴ Tim Penggerak PKK Pusat, Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Hal. 9

perempuan, artinya jika istri adalah pimpinan wilayah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah), maka suaminya dapat menjabat sebagai Ketua TP PKK.

UP2K-PKK adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tujuannya adalah agar usaha ekonomi keluarga bisa ditingkatkan dengan cara bekerja sama atau melakukan usaha sendiri, sehingga bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga. Fokus dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah untuk mengembangkan keterampilan serta menciptakan lapangan kerja di bidang kewirausahaan. Selain itu, Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) juga bertujuan untuk melatih kemampuan berwirausaha di kalangan keluarga, sebagai upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Tujuan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga adalah untuk membantu keluarga yang tidak memiliki sumber penghasilan serta keluarga yang pendapatan mereka rendah. Berdasarkan pengamatan, mereka sangat membutuhkan pelatihan dan tambahan modal untuk berusaha.⁵

Program UP2K-PKK adalah salah satu program penting dalam kerangka jaring pengaman sosial, yang bertujuan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dengan cara memperkuat kemampuan individu atau keluarga agar bisa mandiri secara ekonomi. Program UP2K terdiri dari beberapa tahap, seperti Pembentukan dan Pengembangan Kelompok, Pelatihan serta Pendampingan Usaha, Bantuan Modal untuk Usaha, Pelaksanaan Produksi dan Pemasaran, serta Pemantauan dan Evaluasi.

⁵ Rahmita Budiartiningsih, Reni Gusfrianti, *Peranan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*, (2010), hal. 11"

Secara khusus, tata kelola UP2K mengacu pada Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021, khususnya Buku 2 yang membahas Strategi Gerakan PKK dan Buku 3 yang berisi Juknis Tata Kelola, yang telah resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021. Dokumen ini menjadi pedoman resmi dalam mengelola modal, administrasi kelompok, serta pemasaran produk UP2K di seluruh wilayah Indonesia.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang mendukung program ekonomi ini melalui penguatan kelembagaan di tingkat lokal. Dasar hukumnya berpijak pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, di mana PKK diakui sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, implementasi teknis didukung oleh Peraturan Wali Kota Padang (Perwako) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Perwako ini menjadi pedoman resmi bagi kelurahan dalam melakukan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK, di mana PKK disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis LKK yang wajib dibentuk di tiap kelurahan. Regulasi ini memberikan kewenangan bagi kelompok PKK untuk mengelola usaha ekonomi kreatif dan memfasilitasi akses modal bagi warga melalui program-program seperti Kampung Mandiri. Perwako ini juga menyelaraskan program UP2K dengan rencana strategis dinas terkait dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Padang.

Tim penggerak PKK Kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendekatkan pembinaan ke masyarakat, hingga ke tingkat dasawisma. Kelompok-kelompok dasawisma

merupakan ujung tombak dalam menggerakkan keluarga untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menyampaikan informasi pembangunan ke tingkat keluarga.

Salah satu kelurahan di Kota Padang yang lembaga PKK-nya berusaha meningkatkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan bantuan UP2K adalah Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim Penggerak PKK Kelurahan Parupuk Tabing telah berusaha meningkatkan pengelolaan gerakan PKK dengan membuat rencana kerja setiap tahun, turut serta mendukung program pemerintah, dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Pemilihan Kelurahan Parupuk Tabing sebagai tempat penelitian ialah Kelurahan Parupuk Tabing menjadi Kelurahan aktif dan berprestasi pada masanya yang menjalankan Program UP2K di Kota Padang, kemudian Kelurahan Parupuk Tabing menjadi lokasi Pilot Project Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keahlian).

Pada tingkat operasional di Kelurahan Parupuk Tabing, pembentukan dan pengukuhan Tim Penggerak PKK didasarkan pada Keputusan Lurah setempat. Berdasarkan mandat dari Perwako No. 16 Tahun 2024, Lurah memiliki kewenangan melalui kepala urusan pembangunan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di wilayahnya, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan prestasi tinggi dalam Gerakan PKK. Keberadaan kelompok UP2K di kelurahan ini dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Lurah Parupuk Tabing yang merujuk pada regulasi di atasnya. SK ini menjadi legalitas bagi para kader untuk mengelola

permodalan usaha kecil masyarakat dan menjalankan fungsi pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel 1. 3 Regulasi beserta Fungsinya dalam Pelaksanaan Program UP2K

Tingkat Regulasi	Dasar Hukum Utama	Fungsi dalam Pelaksanaan UP2K
Perpres (Peraturan Presiden)	Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK	Landasan Hukum Tertinggi: Menjadi payung hukum nasional yang mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi keluarga (UP2K) ke dalam rencana pembangunan nasional.
Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri)	Permendagri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 99/2017	Pedoman Teknis Kelembagaan: Mengatur struktur kelembagaan, pembagian tugas Pokja II, tata cara pembentukan Kelompok Usaha UP2K, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
Kepmendagri/Hasil Rakernas	Hasil Rakernas PKK IX (Program Unggulan Gelari Pelangi)	Petunjuk Pelaksanaan Operasional: Menetapkan standar baku administrasi UP2K (seperti buku kas, buku anggota), klasifikasi kelompok (Pemula, Madya, Utama), serta arah program ekonomi mikro berkoperasi.
Perwako (Peraturan Wali Kota) Padang	Peraturan Wali Kota Padang No. 16 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Lembaga	Alokasi Anggaran & Sinergi OPD: Mengatur legalitas pendanaan program PKK melalui APBD Kota Padang serta memayungi sinergi

	Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kota Padang	program UP2K dengan dinas terkait (seperti Dinas Koperasi & UKM Kota Padang).
SK Lurah (Surat Keputusan Lurah)	SK Lurah Parupuk Tabing tentang Pengukuhan Pengurus TP-PKK & Poksus UP2K	Eksekusi & Legalitas Lapangan: Melegalkan kepengurusan Kelompok Khusus (Poksus) dan Kelompok Pelaksana (Poklak) UP2K di tingkat RW/RT, serta menjadi dasar hukum penyaluran modal usaha lokal.

Dukungan pemerintah kelurahan dan keterpaduan dengan OPD terkait menjadikan Parupuk Tabing sebagai model implementasi hukum UP2K yang efektif, terbukti dengan terpilihnya wilayah ini sebagai perwakilan Kota Padang dalam Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat.⁶

Kelurahan Parupuk Tabing terkenal karena berbagai kegiatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian warga. Meskipun Kelurahan lain di Kecamatan Koto Tangah mendominasi juara utama pada 2025, Parupuk Tabing tetap menjadi salah satu kelurahan pilar di Kecamatan Koto Tangah yang konsisten menyumbangkan data dan inovasi, terutama dalam program literasi dan keterampilan keluarga (Rumah Dilan). Sebagai kelurahan percontohan, Parupuk Tabing telah menjadi model bagi kelurahan lain di Koto Tangah dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan.

Berikut adalah data prestasi yang diraih oleh TP-PKK Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang, dalam beberapa tahun terakhir:

⁶ Bagus Shandy Purnamasari, Vidya, Qurrata, Vika Annisa, “Pemberdayaan Wanita Melalui Peluang Usaha Dalam Peningkatan Ekonomi Lokal”, Jurnal Graha Pengabdian, (2020), hlm. 1.

1. Prestasi Utama (2024-2025)

- a) Pilot Project Program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keahlian): Kelurahan Parupuk Tabing melalui Rumah Dilan Farilla Ilmi terpilih sebagai *Pilot Project* Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Prestasi ini diakui sebagai salah satu pencapaian unggulan TP-PKK Kota Padang di tingkat provinsi.
- b) Nominasi Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi (2022): Kelurahan Parupuk Tabing menjadi wakil resmi Kota Padang untuk dinilai dalam Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 setelah berhasil unggul di tingkat kota.

2. Prestasi Bidang Khusus

- a) Lomba Memasak Rendang: Utusan Kelurahan Parupuk Tabing meraih Juara III dalam lomba memasak rendang antar kelurahan se-Kota Padang yang diadakan dalam rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK.
- b) Inovasi UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga): Melalui integrasi di Rumah Dilan, kelurahan ini fokus pada peningkatan keterampilan ekonomi kreatif bagi para ibu rumah tangga dan remaja.

Pembangunan ekonomi nasional yang inklusif harus dimulai dari penguatan ketahanan ekonomi di tingkat keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Mengingat pentingnya hal tersebut, Tim Penggerak PKK Pusat meluncurkan sebuah strategi nasional besar yang diberi nama Gelari Pelangi (Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi). Program ini dibuat oleh Pokja II TP-

PKK sebagai payung kebijakan yang terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mempercepat pertumbuhan usaha mikro yang berbasis keluarga. Di tingkat kelurahan, Gelari Pelangi bertindak sebagai kerangka kerja utuh yang mengintegrasikan aspek pendidikan keterampilan dengan manajemen usaha produktif agar masyarakat mampu mandiri secara finansial.

Namun dalam tataran praktis, implementasi program pemberdayaan ekonomi sering kali berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Fenomena ini terlihat di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Sebagai wilayah pesisir dengan kepadatan penduduk mencapai lebih dari 19.000 jiwa, wilayah ini menghadapi tantangan ekonomi makro yang kompleks pasca-pandemi. Masalah utama yang mengemuka adalah tingginya angka pengangguran informal di kalangan ibu rumah tangga, rendahnya keterampilan adaptif masyarakat, serta melimpahnya limbah lingkungan seperti sabut kelapa yang belum dimanfaatkan optimal. Di sisi lain, para pelaku usaha mikro yang sudah ada di kelurahan ini umumnya masih terjebak pada masalah klasik, yaitu lemahnya tata kelola keuangan, ketiadaan legalitas, serta terbatasnya akses pasar digital yang membuat pendapatan ekonomi keluarga tidak kunjung meningkat.

Untuk memutus mata rantai persoalan tersebut, Kelurahan Parupuk Tabing menerapkan model implementasi Gelari Pelangi secara komprehensif melalui mekanisme hulu-ke-hilir yang melibatkan Rumah Dilan dan UP2K. Di bagian hulu program, pilar pendidikan diwujudkan melalui Rumah Dilan (Rumah Pendidikan dan Keterampilan) Farilla Ilmi. Tempat ini berfungsi

sebagai laboratorium pelatihan nonformal yang bertugas mencetak kompetensi warga dari tidak bisa menjadi terampil, salah satunya melalui inovasi pengolahan limbah sabut kelapa menjadi produk kriya bernilai estetika tinggi. Akan tetapi, keterampilan yang lahir dari Rumah Dilan tidak akan berdampak ekonomis tanpa adanya wadah manajemen bisnis di bagian hilir. Di sinilah program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) mengambil peran krusial sebagai mesin penggerak ekonomi warga lulusan Rumah Dilan. UP2K Kelurahan Parupuk Tabin mengorganisasi para pengrajin baru tersebut ke dalam Kelompok Khusus (Poksus) untuk diberikan intervensi penguatan berupa standarisasi administrasi keuangan (tiga buku utama), fasilitasi perizinan (NIB dan Halal), akses modal bergulir, hingga penyediaan saluran pemasaran melalui Toko PKK dan koperasi. Sinergi struktural yang rapi di bawah payung Gelari Pelangi inilah yang berhasil mengubah potensi lokal menjadi pendapatan riil keluarga, sekaligus mengantarkan Parupuk Tabin menjadi proyek percontohan (*pilot project*) nasional.

Meskipun keberhasilan ekosistem ini diawali oleh pelatihan di Rumah Dilan, kunci keberlanjutan dan dampak nyata terhadap kompetensi atau kesejahteraan keluarga berada sepenuhnya pada efektivitas manajemen di hilir, yaitu melalui implementasi program UP2K. Tanpa akuntabilitas administrasi dan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh UP2K, produk hasil Rumah Dilan hanya akan menjadi pajangan tanpa nilai komersial. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus membatasi dan memfokuskan kajian pada bagaimana peran program UP2K dalam mengelola, mendampingi, dan

menaikkelaskan usaha produktif warga pasca-pelatihan agar benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Meskipun Kelurahan Parupuk Tabing memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro, namun dalam praktiknya, pelaksanaan program UP2K-PKK masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi ekonomi keluarga. Secara lebih spesifik, Kelurahan Parupuk Tabing di Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik unik namun rentan. Sebagai daerah pesisir yang padat penduduk, banyak keluarga di Parupuk Tabing yang bergantung pada sektor informal dan industri rumah tangga tradisional. Di wilayah ini, fenomena kemiskinan sering kali berkaitan dengan rendahnya produktivitas ekonomi perempuan (ibu rumah tangga). Kurangnya akses terhadap teknologi pemasaran dan permodalan yang sistematis membuat potensi ekonomi lokal di Parupuk Tabing jalan di tempat.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang, peneliti mengukur implementasi kebijakan publik dengan menggunakan teori George C. Edward III menggunakan empat variabel, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Untuk melihat variabel komunikasi itu sendiri, peneliti menemukan fenomena dimana tim penggerak pkk telah berupaya menyosialisasikan program UP2K kepada kader dan masyarakat. Namun, sering terjadi hambatan dalam penyampaian informasi yang tidak merata (konsistensi), sehingga pemahaman mengenai

prosedur bantuan atau teknik pemasaran digital tidak terserap dengan sempurna oleh seluruh pelaku usaha. Untuk variabel Sumber Daya yaitu pada indikator kader, Fenomena di Parupuk Tabing menunjukkan bahwa, masih terkendala pada keterbatasan staf lapangan yang memiliki keahlian teknis khusus dan keterbatasan anggaran stimulan, serta fasilitas pendukung bagi kelompok usaha seringkali belum memadai untuk bersaing dengan pasar yang lebih luas.

Adapun dari segi variabel disposisi, muncul fenomena mengenai konsistensi dan motivasi para kader. Peneliti melihat adanya kemauan kuat dari para penggerak PKK, namun terkadang muncul kejenuhan atau kurangnya insentif bagi para kader pelaksana, yang berdampak pada rendahnya intensitas pendampingan terhadap kelompok UP2K. Jika dilihat dari variabel Struktur Birokrasi ini, peneliti menemukan fenomena adanya mekanisme pelaporan dan koordinasi dari tingkat kelurahan ke kecamatan yang terkadang birokratis yang dapat memperlambat respon terhadap kebutuhan mendesak para pelaku usaha di lapangan, dengan kata lain SOP yang kaku.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang isu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai "Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang". Harapannya penelitian ini tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga memiliki kemampuan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing, dilihat dari sudut pandang teori Edwards III?
2. Apa saja faktor penghambatan yang dihadapi dalam menjalankan program UP2K di Kelurahan Parupuk Tabing, dilihat dari segi sumber daya, komunikasi, sikap, dan struktur birokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang, dilihat dari sudut pandang teori George C. Edwards III.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang di hadapi dalam pelaksanaan Program UP2K di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang jika dilihat dari segi sumber daya, komunikasi, sikap, dan struktur birokrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam penerapan kebijakan berdasarkan model George C. Edwards III berada dalam organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Kemudian menjadi bahan yang digunakan oleh peneliti lain yang ingin mempelajari topik tentang pemberdayaan ekonomi keluarga, atau keselarasan dalam penerapan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti menjadi bahan acuan bagi penelitian lain yang membahas topik serupa tentang pelaksanaan program UP2K, serta memberikan saran dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan memanfaatkan program UP2K di Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang.

